

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2019

PROGRAM : Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	INSTANSI : Biro Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Jateng
KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan ANGGARAN : Tahun 2018 : Rp. 400.000.000,- Tahun 2019 : Rp. 120.000.000,-	BAGIAN : Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Setda mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Setda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian **penyusunan kebijakan** Daerah;
- b. pengoordinasian **pelaksanaan tugas Perangkat Daerah**;
- c. **pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah**;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pada Rancangan Program/Kegiatan Setda Tahun 2019 – 2023 disusun dengan mempertajam Indikator Kinerja Kegiatan/Program/Sasaran/Tujuan Berbasis Tusi Setda. Dari keseluruhan fungsi yang ada diturunkan menjadi 9 (sembilan) program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing biro sesuai dengan SKPD ampuan seperti yang tertuang dalam Mekanisme Kerja dan Perumpunan Asisten Sekda Prov Jateng.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- c. Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah diarahkan untuk mengawal pelaksanaan prioritas pembangunan daerah Ketahanan Pangan oleh SKPD pengampu.

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran guna terfasilitasinya penyusunan hasil koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan.

Kondisi ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama ini tergolong cukup, namun di sisi lain cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak masyarakat Jawa Tengah adalah beras, bahkan melebihi dari angka ideal yang ditetapkan yaitu 91 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah justru jauh dari standar konsumsi ideal.

Meskipun ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah sudah baik meskipun belum beragam, namun perlu diperhatikan faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu faktor distribusi pasar, yang dibarengi dengan daya beli masyarakat yang terjaga.

Identifikasi permasalahan di Bidang Pangan diantaranya :

- a. Masih perlunya dorongan untuk peningkatan produksi dan kebutuhan komoditas pangan terutama kedelai dan gula;
- b. Belum terwujudnya system logistik daerah yang terintegrasi dan informatif;
- c. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, perlu dorongan untuk kelompok umbi-umbian, pangan hewani, serta minyak dan lemak;
- d. Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum sesuai harapan karena :
 - Rendahnya animo masyarakat untuk menjadikan tanahnya sebagai LP2B;
 - Masih sulitnya pengendalian untuk mempertahankan LP2B di Jawa Tengah baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat pemilik lahan;
 - Dalam proses revisi RTRW kab/kota umumnya kabupaten/kota meminta pengurangan lahan pertanian karena adanya kebutuhan untuk pembangunan;
 - Pemberian status tanah pertanian menjadi LP2B dirasa masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat petani.

Sesuai Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah untuk bisa mengawal pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah terkait Bidang Ketahanan Pangan oleh SKPD pengampu maka diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang sinergis antara SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk mendukung program kegiatan tersebut di atas dialokasikan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan adalah dalam rangka pendampingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ketahanan pangan oleh SKPD pengampu tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tujuan kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya penyusunan laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan.

3. Lokasi dan Sasaran Kegiatan :

Lokasi dan Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan adalah SKPD terkait Tingkat Provinsi, Pemerintah dan SKPD Kabupaten/Kota.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KET
1.	Persiapan	Penyusunan RKO	
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rapat-rapat fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan b. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan c. <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan d. Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian terkait e. Monitoring dan evaluasi 	
3.	Pelaporan	Penyusunan laporan koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	

5. Jadwal Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Persiapan : Penyusunan RKO	Januari - Pebruari
2	Pelaksanaan : a. Rapat-rapat fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan b. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan c. <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan d. Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian terkait e. Monitoring dan evaluasi	Maret - Nopember
3	Pelaporan : Penyusunan Laporan koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	Desember

6. Keluaran

- a. Rapat-rapat failitasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 10 kali;
- b. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 2 kali;
- c. *Focus Group Discussion (FGD)* Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 2 kali;
- d. Laporan koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 1 laporan.

7. Anggaran

Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Rincian terlampir.

8. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga pelaksanaan prioritas pembangunan daerah oleh SKDP pengampu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai/tepat sasaran guna mendukung upaya terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2018

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM

Dra. PENI RAHAYU, M.Si
NIP. 19620921 198903 2 005